Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 05, No. 01, April 2025, pp. 12-24
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v5i1.694

Pengambilan Keputusan Strategis dalam Pengaturan Konten Digital: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Hoaks di Era Digital

Ahmad Fuad Fanani, Lu'luatul Kamalah, Adit Abdillah, Wina Arsy Septiani, Muhamad Hamzah
fuad.fanani@umj.ac.id lulukmlahhh47@gmail.com, aditabdillah727@gmail.com, winaaseptianii15@gmail.com, hamzahmuhamad774@gmail.com

Abstrak

Penyebaran hoaks di era digital telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik, terutama di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, yang seharusnya mempermudah kehidupan, malah sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, yang berpotensi memicu konflik horizontal dan merongrong fondasi negara. Artikel ini membahas tantangan dalam mengendalikan penyebaran hoaks melalui pendekatan kebijakan dan teknologi, dengan fokus pada penguatan literasi digital dan penggunaan logika kontrak pintar berbasis struktur graf sosial. Literasi digital menjadi solusi penting dalam membangun kemampuan kritis masyarakat dalam memilah informasi yang valid, sementara kontrak pintar berfungsi sebagai mekanisme untuk memblokir pesan palsu secara reaktif. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengendalian hoaks, seperti regulasi yang tidak konsisten, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta tantangan dalam kolaborasi antar-pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dan penggunaan teknologi canggih dapat membantu mengurangi dampak negatif hoaks, namun penegakan hukum yang konsisten dan kebijakan berbasis data tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran hoaks lebih lanjut. Artikel ini juga menyoroti dilema antara kebebasan berekspresi dan pengendalian informasi dalam upaya menjaga ketertiban dan stabilitas nasional.
Kata Kunci: hoaks, literasi digital, kontrak pintar, pengendalian informasi, kebebasan berekspresi, stabilitas nasional.

Abstract

The spread of hoaxes in the digital era has become a serious issue affecting social and political stability, particularly in Indonesia. Information and communication technologies, especially social media, which should simplify life, are often exploited to disseminate false information that can trigger horizontal conflicts and undermine national foundations. This article discusses the challenges in controlling the spread of hoaxes through policy and technological approaches, focusing on strengthening digital literacy

and utilizing smart contract logic based on social graph structures. Digital literacy is identified as a critical solution in building the public's ability to critically assess valid information, while smart contracts function as a mechanism to reactively block false messages. This research also identifies factors that influence the effectiveness of hoax control policies, such as inconsistent regulations, limited law enforcement capacity, and challenges in collaboration between stakeholders. The findings suggest that enhancing digital literacy and using advanced technology can help mitigate the negative impacts of hoaxes. However, consistent law enforcement and data-driven policies remain essential in preventing further hoax dissemination. The article also highlights the dilemma between freedom of expression and information control in efforts to maintain public order and national stability
Keywords: hoaxes, digital literacy, smart contracts, information control, freedom of expression, national stability.

Pendahuluan

Penyebaran hoaks di era digital semakin mendesak untuk dikendalikan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media komunikasi yang awalnya didominasi oleh media massa konvensional kini beralih ke media sosial, yang seharusnya mempermudah kehidupan manusia. Namun, berbagai kepentingan telah membuat media sosial kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, termasuk hoaks, yang berpotensi mengancam persatuan dan stabilitas masyarakat. Hoaks tidak hanya menjadi permasalahan dunia maya, tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan nyata, termasuk memicu konflik horizontal di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan di indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan keberlanjutan masyarakat.

Hukum pidana dirancang sebagai alat rekayasa sosial melalui efek jera, tetapi implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara memberantas hoaks dan menjaga kebebasan berbicara serta hak untuk memperoleh informasi. Salah satu pendekatan inovatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan logika kontrak pintar berbasis struktur graf sosial. Pendekatan ini memungkinkan pencegahan

konsumsi informasi palsu melalui mekanisme indeks kepercayaan yang menghitung karakteristik pesan dan atribut kelompok. Dengan demikian, pesan palsu dapat secara reaktif diblokir meskipun sesuai dengan minat kelompok pengguna.

Solusi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan literasi digital sebagai langkah mitigasi hoaks di era disrupsi. Literasi digital mampu membangun kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi. Peningkatan literasi ini dapat dilakukan secara strategis melalui pendidikan di sekolah, keluarga, dan komunitas. Semakin tinggi tingkat literasi digital masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka untuk memilah informasi yang benar.

Meski pemerintah telah berupaya memblokir akun-akun penyebar hoaks di media sosial, penyebaran hoaks masih terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih akurat, salah satunya dengan memahami perilaku penerimaan dan berbagai informasi hoaks di media sosial. Hoaks tidak hanya mengancam ketertiban umum tetapi juga berpotensi merongrong fondasi negara, terutama dalam situasi krusial seperti pemilihan umum. Upaya untuk mencegah hoaks menjadi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan literasi digital dapat dilakukan dengan fokus pada delapan elemen kunci, yaitu pemahaman konteks, perluasan wawasan, penciptaan konten positif, kemampuan berkomunikasi dan berjejaring, kepercayaan diri dan tanggung jawab, kreativitas, pemikiran kritis, serta dukungan terhadap masyarakat sipil. Pendidikan literasi digital ini bisa diintegrasikan melalui sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya.

Artikel ini menunjukkan bahwa individu dengan keterampilan digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam berbagai berita karena mereka memeriksa validitas informasi terlebih dahulu. Sebaliknya, individu dengan keterampilan digital rendah seringkali membagikan informasi tanpa

memverifikasinya. Generasi digital saat ini memiliki peran penting dalam mendidik generasi yang lebih tua, seperti orang tua, dalam menyaring informasi di dunia maya. Pendekatan ini melibatkan identifikasi berita palsu dan konfrontasi secara sopan dan penuh hormat.

Secara keseluruhan, peningkatan literasi digital merupakan solusi yang efektif untuk melawan penyebaran hoaks di era post-truth. Literasi digital membantu individu memverifikasi informasi dan memilih sumber informasi yang valid, sehingga penyebaran hoaks dapat diminimalkan.Dengan literasi yang lebih baik, pengguna media sosial dapat mengendalikan konsumsi dan distribusi informasi secara lebih bijak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan untuk menganalisis kebijakan pengendalian hoaks dalam konteks pengaturan konten digital. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait kebijakan pemerintah, undang-undang yang relevan, serta literasi digital masyarakat. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi efektivitas pengendalian hoaks.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis konten untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber informasi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran hoaks serta efektivitas kebijakan pengendaliannya.

Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi strategis untuk penguatan kebijakan berbasis data, yang mencakup penggunaan teknologi kontrak pintar, peningkatan literasi digital, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital. Dengan kombinasi analisis kebijakan dan pendekatan berbasis teknologi, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi

praktis dan teoritis dalam upaya mengatasi penyebaran hoaks di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Dampak Hoaks

1. Pengertian hoaks sebagai ancaman sosial di era digital.

Hoaks atau berita palsu merupakan salah satu tantangan sosial utama di era digital. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang keliru, terjadi dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital, khususnya media sosial. Situasi ini diperburuk oleh fenomena post-truth, dimana emosi dan keyakinan individu seringkali lebih berpengaruh daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik. Penyebaran hoaks melalui media sosial dan aplikasi percakapan seperti WhatsApp dapat menciptakan kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi penyebaran hoaks adalah tingkat literasi digital. Individu dengan tingkat literasi digital rendah, yang seringkali berkorelasi dengan tingkat pendidikan, cenderung lebih mudah termanipulasi oleh hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak penyebaran hoaks. Literasi digital melibatkan berbagai keterampilan, seperti kemampuan memahami konteks informasi, berpikir kritis, dan memverifikasi keaslian informasi. Dengan literasi digital yang lebih baik, masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana dan bersikap lebih kritis terhadap informasi yang diterima.

Selain literasi digital, pemanfaatan teknologi modern dapat menjadi solusi untuk mengatasi hoaks. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan logika kontrak pintar (Smart contract logics) untuk mendeteksi dan memblokir pesan palsu. Sistem ini bekerja berdasarkan indeks kepercayaan yang dihitung dari karakteristik pesan dan atribut

kelompok pengguna, sehingga memungkinkan perbatasan distribusi konten palsu secara lebih efektif.

Dampak hoaks tidak hanya dirasakan secara individu tetapi juga pada tingkat sosial yang lebih luas, termasuk ancaman terhadap proses demokrasi. Selama pemilihan presiden di Indonesia, misalnya, hoaks dan disinformasi yang beredar luas di media sosial berpotensi mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan. Selain itu, hoaks juga dapat menimbulkan kepanikan, terutama dalam situasi kritis seperti pandemi Covid-19. Informasi palsu terkait kesehatan yang tersebar selama pandemi telah telah menyebabkan kebingungan dan pengambilan keputusan yang keliru oleh masyarakat.

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan masyarakat. Pemerintah dapat mengembangan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap penyebaran informasi di media sosial. Di sisi lain, platform digital perlu meningkatkan algoritma mereka untuk mendeteksi dan membatasi distribusi hoaks secara proaktif. Edukasi publik tentang literasi digital juga harus menjadi prioritas, dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mencari informasi yang valid, membedakan fakta dari opini, serta mengenali berita palsu. Melalui kolaborasi ini, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi hoaks dapat ditingkatkan, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan.

2. Dampak pada ketertiban umum, konflik horizontal, dan stabilitas nasional.

   Di Indonesia, hoaks kerap menjadi pemicu konflik horizontal, terutama ketika berhubungan dengan isu-isu sensitif seperti politik, agama, ras, etnis, dan antar kelompok. Untuk menjaga keterlibatan umum dan keberlanjutan masyarakat, pemerintah menggunakan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial dengan memberikan efek jera.

Sejak pemilu 2024, ruang publik informasi di Indonesia dipenuhi dengan hoaks, sering kali membuat pembaca salah memahami fakta. Fenomena ini semakin meningkat menjelang perhelatan politik, dimana ada dugaan kuat bahwa pihak-pihak tertentu sengaja menciptakan dan menyebarkan hoaks demi mencapai tujuan tertentu. Hoaks atau informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu telah menjadi tantangan serius di era digital. Dampaknya tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal dan mengancam stabilitas nasional.

Hoaks berdampak besar pada keterlibatan masyarakat. Informasi palsu yang tersebar melalui media sosial sering kali menimbulkan kebingungan publik. Ketika masyarakat menerima berita yang keliru, respons emosional dan irasional kerap terjadi, yang dapat berujung pada kekacauan. Misalnya, hoaks tentang bencana alam atau insiden kriminal dapat memicu kepanikan massal yang sangat sulit dikendalikan.

Di indonesia, hoaks sering kali menyentuh isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Hoaks yang bermuatan SARA berpotensi memicu ketegangan di antara kelompok masyarakat, yang dapat berkembang terjadi konflik fisik. Konflik horizontal semacam ini tidak hanya merusak hubungan antar komunitas, tetapi juga mengancam keamanan dan kedamaian di tingkat lokal.

Hoaks yang bermotif politik memiliki dampak yang lebih luas terhadap stabilitas nasional. Penyebaran informasi palsu saat proses pemilu, misalnya, dapat mempengaruhi pandangan publik dan mengganggu integritas demokrasi. Akibatnya, ketegangan politik dapat meningkat, dan stabilitas nasional menjadi terganggu. Selain itu, hoaks juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media. Jika masyarakat terus terpapar informasi palsu, mereka cenderung menjadi skeptis terhadap informasi dari informasi sumber resmi, sehingga upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan stabilitas

menjadi terhambat.

Mengurangi dampak negatif hoaks memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait penyebaran hoaks. Selain itu, platform media sosial perlu berperan aktif dalam memantau atau menghapus konten yang menyesatkan. Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi langkah penting. Edukasi yang mendorong kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi dan memahami mekanisme kerja media sosial perlu digalakkan. Kampanye literasi digital dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya hoaks dan cara mengatasinya.

Peran algoritma media sosial dalam amplifikasi hoaks

Algoritma media sosial memainkan peran yang signifikan dalam amplifikasi hoaks atau informasi palsu. Algoritma ini bertugas untuk menentukan konten mana yang akan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Beberapa algoritma media sosial bahkan dapat meningkatkan keterpaparan konten hoaks dengan memberikan prioritas kepada konten yang menarik perhatian pengguna, meskipun kebenarannya dipertanyakan.

Salah satu contoh peran algoritma media sosial dalam menyebarkan hoaks adalah dengan memperkuat filter bubble. Filter bubble adalah fenomena di mana algoritma media sosial menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna, sehingga mereka cenderung hanya diberikan informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran hoaks lebih mudah, karena informasi palsu tersebut terus-menerus diperkuat oleh algoritma.

Selain filter bubble, algoritma media sosial juga dapat membuat konten hoaks menjadi viral dengan cara menyebarluaskannya kepada pengguna yang memiliki pemikiran serupa. Hal ini bisa terjadi karena algoritma mengetahui

bahwa pengguna dengan pandangan yang mirip lebih cenderung untuk berinteraksi dengan konten tersebut, sehingga membuat konten hoaks tersebut menyebar dengan cepat.

Tantangan dalam Mengatasi Hoaks

1. Keterbatasan regulasi dan implementasi hukum

   Keterbatasan regulasi dan implementasi hukum dalam menangani penyebaran hoaks di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita palsu. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait keterbatasan ini.

2. Kelemahan dalam regulasi

   Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dalam regulasi itu sendiri. Meskipun UU ITE memberikan sanksi tegas bagi penyebar hoaks, banyak orang masih merasa bahwa regulasi tersebut tidak diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam definisi hoaks dan kesulitan dalam membuktikan niat jahat di balik penyebaran informasi tersebut. Selain itu, banyak kasus yang melibatkan media sosial belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga penegakan hukum terasa tidak konsisten dan sering kali tidak memadai.

3. Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

   Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Banyak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, yang tidak memiliki fasilitas atau pelatihan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi. Penyidikan kasus hoaks seringkali memerlukan metode digital forensik yang tidak semua instansi memiliki akses atau kemampuan untuk melakukannya. Akibatnya, banyak

kasus hoaks yang tidak terungkap atau terabaikan.

4. Regulasi Konten Digital

Kebebasan berekspresi di dunia digital memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara luas. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, yang mencapai 175,5 juta di Indonesia pada tahun 2020, muncul tantangan terkait validitas informasi yang beredar. Media sosial sering kali menjadi platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menjadi sarana penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan tidak merugikan.

5. Tantangan dalam Implementasi Hukum

Regulasi konten digital di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang aman. Namun, penerapan regulasi ini sering kali menimbulkan dilema. Di satu sisi, regulasi ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah; di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa regulasi tersebut dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau individu tertentu. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan akan pengendalian informasi dan hak individu untuk berekspresi.

Salah satu tantangan dalam implementasi hukum terkait kebebasan berekspresi adalah kurangnya kejelasan dalam definisi konten yang dianggap merugikan. Misalnya, istilah "meresahkan" dalam beberapa regulasi tidak memiliki indikator yang jelas, sehingga bisa disalahartikan oleh pihak berwenang. Hal ini dapat menyebabkan tindakan represif terhadap konten yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan pedoman yang lebih konkret agar penegakan hukum dapat

dilakukan secara adil.

Kesimpulan

Penyebaran hoaks di era digital merupakan masalah serius yang berdampak pada stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Meskipun media sosial seharusnya mempermudah akses informasi, kenyataannya ia sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat memicu konflik horizontal di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengendalikan hoaks, termasuk kebijakan pengendalian konten digital yang berbasis data dan peningkatan literasi digital di masyarakat.

Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi bahwa pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada pemahaman konteks dan karakteristik pesan dapat memperkuat pengendalian hoaks. Penggunaan teknologi kontrak pintar berbasis struktur graf sosial menawarkan pendekatan baru dalam memfilter pesan palsu secara reaktif, bahkan ketika pesan tersebut sesuai dengan minat kelompok pengguna. Namun, keberhasilan dalam pengendalian hoaks tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan teknologi, tetapi juga pada peran literasi digital masyarakat. Individu dengan keterampilan digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, sementara individu dengan keterampilan rendah lebih mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Peningkatan literasi digital menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat memilah informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, keluarga, dan komunitas. Selain itu, generasi digital saat ini memiliki peran penting dalam mendidik generasi yang lebih tua dalam menyaring informasi

dengan bijak.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi penyebaran hoaks, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data. Penerapan teknologi kontrak pintar dan penguatan literasi digital adalah langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif hoaks di media sosial dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat dan keterampilan digital yang lebih baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi di dunia maya.

Daftar Rujukan

Amanda, N., Verônica, É., Liandi, V. V., Simanjuntak, R. R., & Subakdi, S. (2024). Pentingnya Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Bagi Generasi Z di Era Media Sosial. Jurnal Ilmu HukumDan Administrasi. https://consensus.app/papers/pentingnya-mewujudkan-pertahanan-dan- keamanan-bagi-amanda-ver%C3%B4nica/4dba88b583e85eb19c25ab02296f84ac/

Amelita, T., Wiyanto, S., & Irwansyah, I. (2024). The Role of the Coordinating Ministry of Economic Public Relations in Overcoming Hoaxes on Social Media. Journal La Sociale.

Bae, S., & Hasan, I. (2024). Hoax News As An Ethical Violation Impact Of Information Technology Advances. Jurnal Improsci. https://consensus.app/papers/hoax-news-as-an-ethical-violation-impact-of- information-bae-hasan/655abd0955b25d78bd8d069e91012e69/

Colleoni, E., Rozza, A., & Arvidsson, A. (2014). Echo chamber or public sphere? Predicting political orientation and measuring political homophily in Twitter using big data. Journal of Communication, 64(2), 317–332. https://doi.org/10.1111/jcom.12084

Hidayat, Muhammad Syaamil. (2023). Dilema Regulasi Konten

Digital Terhadap Kebebasan Berpendapat. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/4950/1930 Kurniasih, E., Damayani, N. A., & Zubair, F. (2024). The Role of Information Literacy in Mitigating the Spread of Hoaxes on Social Media. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan. https://consensus.app/papers/the-role- of-information-literacy-in-mitigating-the-spread-kurniasih-damayani/0a2c57fcb465504bb32c9dbf504e0f37/

Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. Science, 359(6380), 1094–1096. https://doi.org/10.1126/science.aao2998

Pomichal, V. (2024). Hoaxes in Social Media: Can Game-Based Learning Beat Them? European Conference on Social Media. https://consensus.app/papers/hoaxes-in-social-media-can-gamebased-learning- beat-them-pomichal/a265745e056b5c749bdfc6663bca14b2/

R. Hayati, Kinanti., Loviantary, Anindya., Amalia Iswandy, Deswina. (2023). Pengaruh Berita Hoax di Indonesia Menurut Pandangan Mahasiswa Teknik Lingkungan Kelas B Angkatan 2022 UPN "Veteran" Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 212-220. https://doi.org/10.5281/zenodo.8009509

Romein, R. A., & Chudra, G. (2024). The Role of Information Technology in Combating Hoaxes and Misinformation. Journal of Universal Studies, 4(7), https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i7.1515

Samudra, A. H. (2021). How Far the Authorities are Going to go on Tackling Political Motive Hoax Spreading. Kertha Patrika. https://consensus.app/papers/how-far-the-authorities-are-going-to-go-on- tackling-samudra/4347b2c36d565985961cd27e5bfd8259/

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 04, No. 02, Desember 2024, pp. 1-13
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v4i2.628